



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PARTISIPASI PEMILIH



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU

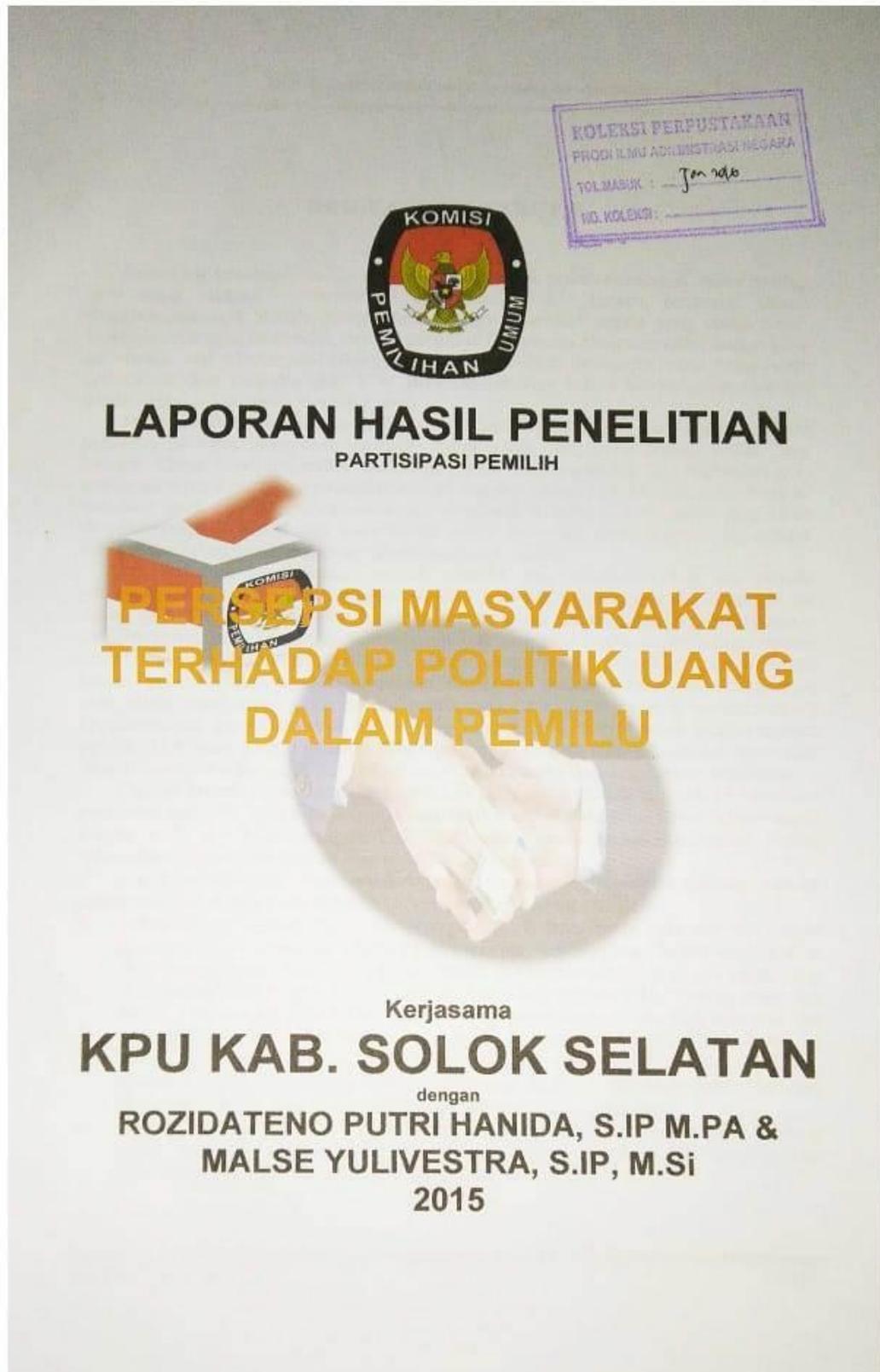
Kerjasama

KPU KAB. SOLOK SELATAN

dengan

ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP M.PA &
MALSE YULIVESTRA, S.IP, M.Si

2015



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktek politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Dalam penyelenggaraannya, pemilu menghabiskan anggaran belanja negara yang cukup besar. Tentunya dana yang besar tidak menjadi persoalan jika pemilu diselenggarakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Data yang diungkap ICW 2014 menyebutkan bahwa kecurangan-kecurangan pemilu selalu didominasi oleh politik uang.

Praktek politik uang ini membahayakan setiap elemen bangsa, sehingga semestinya persoalan ini harus diupayakan pencarian solusi untuk mengurangi praktek politik uang tersebut. Untuk bisa mengetahui bagaimana politik uang itu terjadi dan bagaimana pola politik uang itu, KPU mengembangkan sebuah kegiatan ilmiah yang berbasis riset. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam penyelenggaraan PEMILU dan merumuskan solusi kebijakan untuk mengurangi praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode eklaktif yang menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar ada ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap politik uang. Mengingat keberadaan politik uang yang selalu disebut sebagai rahasia umum, artinya tidak ada orang yang ingin dengan sangat polos menceritakan bahwa dirinya adalah “pelaku” politik uang dalam pemilu. Kerahasiaan praktek politik uang ini diketahui oleh publik, akan tetapi pada saat itu publik juga tidak ingin bercerita banyak tentang bagaimana dan seperti apa pola politik uang yang mereka terima dalam penyelenggaraan pemilu. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner terstruktur dengan wawancara langsung, yaitu enumerator bertatap muka langsung dengan responden.

Dengan kriteria responden dalam penelitian yang meliputi; usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah, sehat rohani dan jasmani, berdomisili di Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan KTP, dan bukan anggota TNI/POLRI aktif, penelitian ini menetapkan jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang responden.

Survei ini dilakukan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam pemilu menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Partisipasi politik masyarakat tidak terpengaruh oleh politik uang, yaitu dari hasil survey diketahui bahwa sebanyak 138 responden atau 92 % menyatakan bahwa mereka akan tetap menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu meskipun tidak ada calon yang memberikan politik uang kepada mereka. Sementara itu sebanyak 4 orang responden atau 2,7 % menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak suaranya dan sisanya sebanyak 8 orang responden atau 5,3 % tidak menjawab. Hasil survey ini mengindikasikan bahwa betapa rendahnya pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat pada saat pemilu. Artinya masyarakat tidak membutuhkan pemberian uang dari peserta pemilu untuk mau ikut terlihat dalam pelaksanaan pemilu.
2. Menurut responden, praktek politik uang di Kabupaten Solok Selatan lebih dominan terjadi pada pagi hari sebelum pemilihan dan pada saat masa kampanye terbuka dibandingkan dengan masa pemerintahan lainnya.
3. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 113 responden atau 75,3 % menyatakan bahwa praktek politik uang dalam pemilu tidak dibenarkan.
4. Sebagian besar responden atau sebanyak 132 orang responden atau 88 % responden menyatakan setuju dan memiliki keinginan agar terbebas dari praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya 1 orang responden (0,7 %) yang menginginkan pemilu itu bersih dari praktek politik uang. Sisanya sebanyak 8 orang responden (5,3 %) menyatakan tidak peduli dengan kondisi tersebut dan sebanyak 9 orang responden (6 %) tidak mau menyatakan persepsinya.
5. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak dipengaruhi oleh politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Politik uang cenderung dilakukan peserta pemilu sebagai langkah untuk mendulang suaranya. Namun di satu sisi, dengan tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, justru politik uang ini tidak akan mampu mempengaruhi keinginan hati nurani masyarakat pada saat pemilihan.
6. Menurut responden, praktek politik uang hanya dapat diatasi jika setiap pihak konsisten dengan penegakan hukum, dan harus bersumber dari kesadaran masyarakat dan juga peserta pemilu untuk tidak lagi menerima dan membagi-bagikan uang di saat pemilu.
7. Sikap diam responden menghadapi praktek politik uang dipengaruhi karena faktor tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang menerima atau memberi uang dalam praktek politik uang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, oleh karenaNya maka laporan Penelitian Partisipasi Masyarakat terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Politik Uang dalam PEMILU tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan sikap dan perilaku masyarakat dalam PEMILU terhadap praktek politik uang, termasuk upaya mencari solusi untuk menghapus dan atau minimal menurunkan prkatek politik uang tersebut.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi alat untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat terhadap pemilu yang bebas dari praktek politik uang dan membantu kinerja KPUD sebagai penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan sistem kontrol yang baik bagi penguasa.

Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Oleh sebab itu masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian maupun pembuatan laporan penelitian. Secara khusus terimakasih untuk KPU Kab. Solok Selatan dan masyarakat Kab. Solok Selatan yang telah berkenan memberikan informasi sebagai responden dalam penelitian ini.

Kiranya kerjasama yang telah terjalin dapat terbangun lebih baik dan efektif lagi dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang peduli dalam praktek negara demokrasi.

Peneliti

Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA

& Malse Yulivestra, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
1. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.2 Lokasi Penelitian	7
1.4.3 Kriteria Dan Jumlah Responden	8
1.4.4 Pelaksanaan dan Waktu Penelitian	9
1.5 Pelaporan	9
2. KARAKTERISTIK RESPONDEN	10
3. PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU	15
4. PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT	21
5. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG ...	25
6. KESIMPULAN	43
6.1 Kesimpulan	43
6.2 Rekomendasi	44

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyelenggarakan PEMILU adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem bernegara yang didasarkan pada paradigma bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dimaknai dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga pemimpin dipilih dari dan oleh rakyat.

Pemilu menghantarkan proses transisi kepemimpinan pada saat pergantian dari pemimpin lama ke pemimpin baru. Dan dalam penyelenggaraannya, pemilu tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislative pada tahun 2014 menghabiskan anggaran negara yang cukup lumayan, yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.608.545.705.000,- yang terealisasi sebesar 52,48% yaitu sebesar Rp. 844.142.178.629,- Dan itu tentunya belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon dalam berkampanye, yang tentunya dana yang mereka keluarkan tidaklah kecil.

Dana yang besar tidak menjadi persoalan jika pemilu diselenggarakan dengan jujur dan bebas dari kecurangan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Data yang diungkap ICW 2014 menyebutkan bahwa kecurangan-kecurangan pemilu selalu didominasi politik uang.

Praktek politik uang ini membahayakan setiap elemen bangsa. Tentunya persoalan itu harus diupayakan pencarian solusi untuk mengurangi praktek politik uang tersebut. Dalam konteks seperti itu untuk kita bisa mengetahui bagaimana politik uang itu terjadi, pola

politik uang seperti apa, salah satunya adalah dengan cara dimana KPU mengembangkan sebuah kegiatan ilmiah yang berbasis riset untuk dapat memberikan gambaran dari kondisi tersebut dan dapat disusun solusi pemecahan masalahnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Politik Uang dalam PEMILU?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktek politik uang dalam penyelenggaraan PEMILU
2. Merumuskan solusi kebijakan untuk mengurangi praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian peneliti menggunakan metode eklaktif, yaitu menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar ada ruang yang lebih luas bagi peneliti untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap politik uang. Mengingat keberadaan politik uang yang selalu disebut sebagai rahasia umum, artinya tidak ada orang yang ingin dengan sangat polos menceritakan bahwa dirinya adalah “pelaku” politik uang dalam pemilu. Kerahasiaan praktek politik uang ini di ketahui oleh publik, akan tetapi pada saat itu publik

juga tidak ingin bercerita banyak tentang bagaimana dan seperti apa pola politik uang yang mereka terima dalam penyelenggaraan pemilu.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan di wilayah kerja KPUD Kabupaten Solok Selatan, yang meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Pengumpulan data primer dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden (bertatap muka). Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kab. Solok Selatan, yang terdiri dari tujuh Kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

1.4.3 Kriteria Dan Jumlah Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah
2. Sehat rohani dan jasmani
3. Berdomisili di Kab. Solok Selatan yang berdasarkan KTP

4. Bukan anggota TNI/POLRI aktif

Ada banyak rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah sampel, dalam penelitian ini penghitungan dilakukan dengan pendekatan rumus Slovin.

Menurut rumus Slovin dalam Green (2000) penghitungan jumlah sampel dapat dilakukan dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + E^2)}$$

dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = nilai *sampling error*

sehingga didapatkan: $n = 143.544 / (1 + 143.544 (0.05)^2) = 100$

Dengan nilai N sebesar 143.544 juta jiwa dan nilai *sampling error* sebesar 0.1, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 jiwa.

Dari penghitungan statistik tersebut terlihat bahwa jumlah minimum responden adalah 100. Dan dengan pertimbangan kebutuhan analisis, luas wilayah penelitian, ketersediaan anggaran dan sumber daya, maka jumlah responden untuk penelitian ini ditetapkan berjumlah 150 orang. Ada penambahan sebanyak 50 responden dari hasil yang didapat dari perhitungan dengan rumus Slovin, ini dilakukan dengan pertimbangan luas wilayah dengan sebaran penduduk. Yang dalam pengambilan sampelnya dihitung secara proporsional dari jumlah TPS yang ada. Dalam segi kuantitas angka ini belum dianggap mewakili, akan tetapi dari segi kualitas ini sudah mewakili tiap-tiap kasus yang mungkin terjadi di tiap TPS.

Tabel. Sebaran dan Jumlah Responden Perkecamatan

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Responden
Koto Parik Gadang Diateh	57	22
Sungai Pagu	72	28
Pauh Duo	46	17
Sangir	98	37
Sangir Jujuan	36	14
Sangir Balai Janggo	46	17
Sangir Batang Hari	40	15

1.4.4 Pelaksanaan dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Malse Yulivestra, S.IP, M.Si yang dibantu oleh para enumerator di lapangan, yaitu oleh Cherry Amelia, Fahrul Rozi, Masruli, Adelin Anwar, Diana Putri, dan Nugroho Wasispratama. Enumerator bekerja dan mengumpulkan data primer dan data skunder di lapangan. Penelitian dilakukan pada minggu ke dua Juli hingga minggu ke 2 Agustus, yang di dalamnya sudah termasuk kegiatan membuat laporan penelitian.

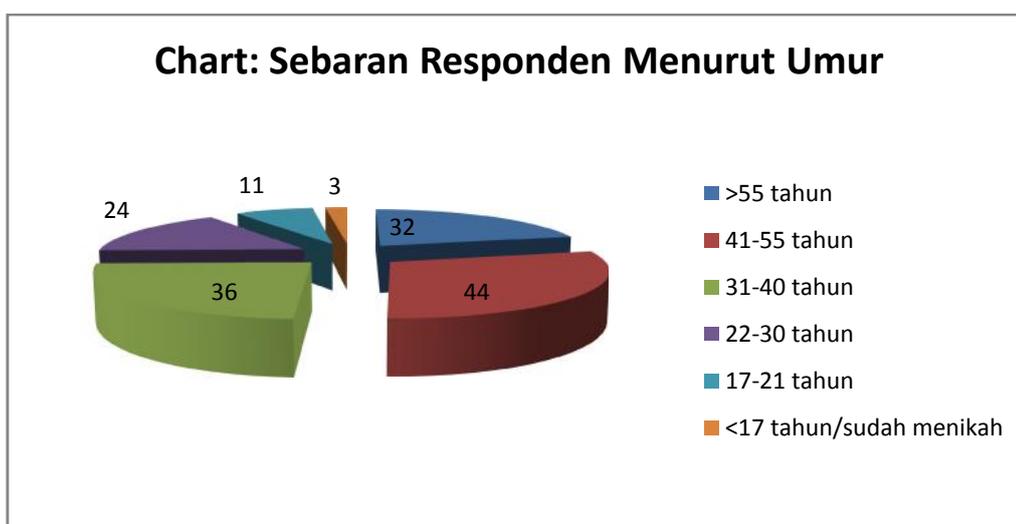
1.5 Pelaporan

Bentuk luaran dari penelitian ini adalah laporan penelitian. Data yang dikumpulkan di tujuh kecamatan di Kab. Solok Selatan dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

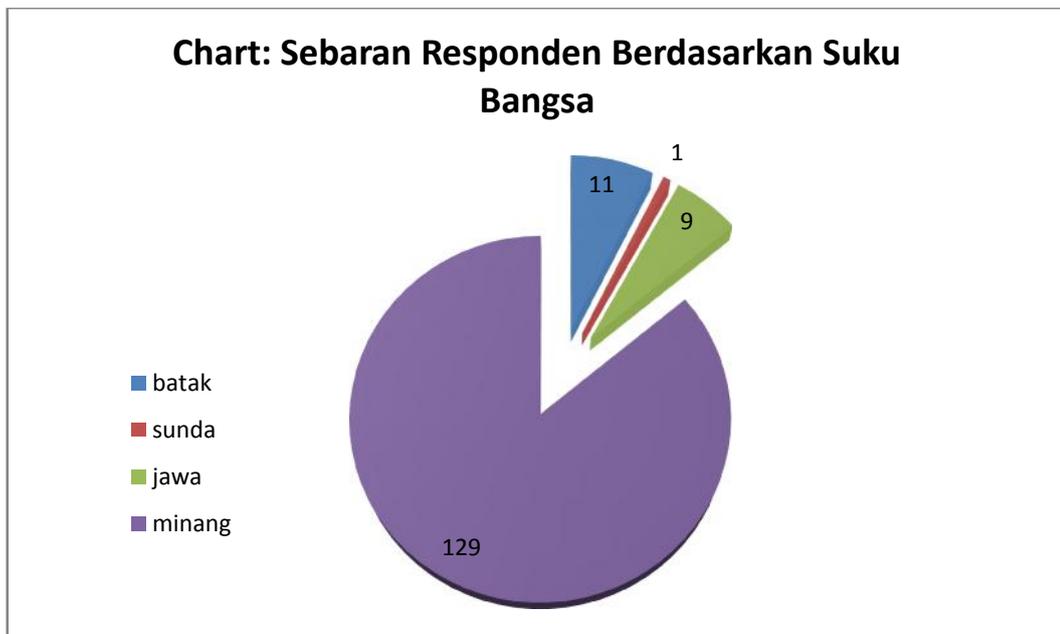
Jumlah responden dalam penelitian partisipasi pemilih, terkait persepsi masyarakat mengenai isu praktek politik uang dalam pemilu ini adalah 150 orang responden. Responden tersebut tersebar di tujuh kecamatan di Kab. Solok Selatan, yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

Dari 150 responden diketahui bahwa pendidikan terakhir responden diantaranya sebanyak 41 orang tidak/lulusan SD, 39 orang lulusan SLTP, 52 orang lulusan SLTA, dan 18 orang lulusan D3 dan S1. Artinya sebanyak 27,3% tidak/lulusan SD, 26% lulusan SLTP, 34,7% lulusan SLTA, dan 12% lulusan D3 dan S1. Sedangkan jika ditinjau dari umur responden dalam penelitian ini tersebar seperti dalam grafik berikut.



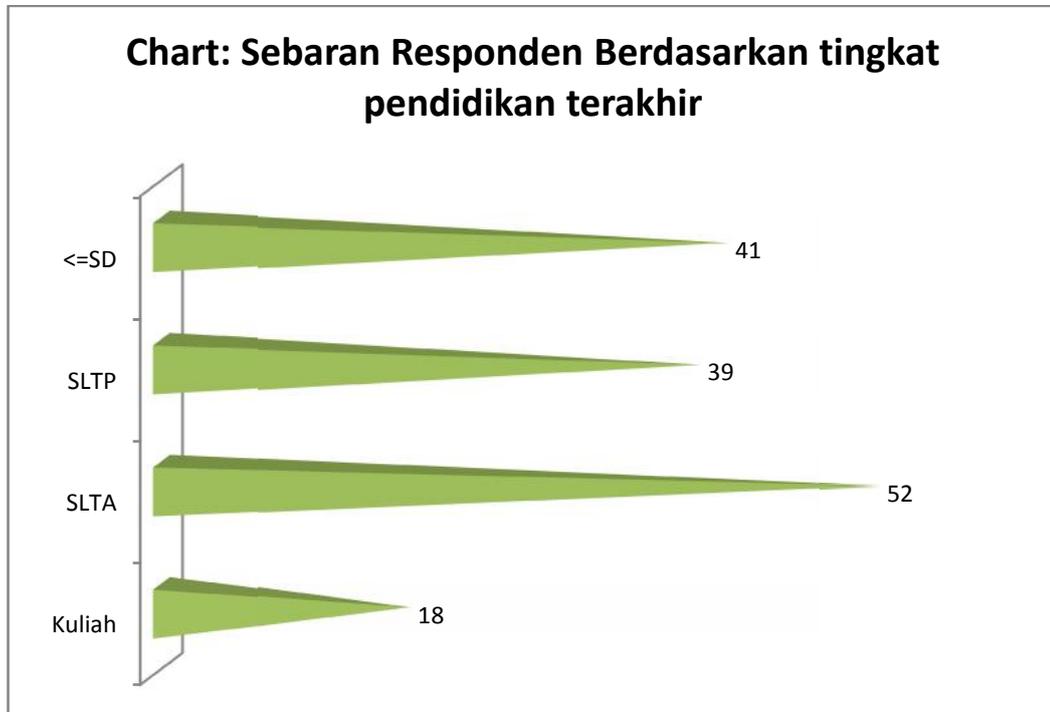
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 150 responden ditemukan kisaran umur responden sebanyak 3 orang berumur <17 tahun/sudah menikah, 11 orang berumur 17-21 tahun, 24 orang berumur 22-30 tahun, 36 orang berumur 31-40 tahun, 44 orang berumur 41-55 tahun, dan 32 orang berumur >55 tahun. Artinya sebanyak 2% berumur <17 tahun/sudah menikah, 7,3% berumur 17-21 tahun, 16% berumur 22-30 tahun, 24% berumur 31-40 tahun, 29,3% berumur 41-55 tahun, dan 21,4% responden berumur >55 tahun.

Dilihat dari jenis kelamin responden, dalam penelitian ini yang menjadi responden dari 150 orang yang disurvei di Kab. Solok Selatan terdapat sebanyak 89 orang responden atau 59 % berjenis kelamin perempuan dan 52 orang responden atau 39% berjenis kelamin laki-laki. Yang tersebar ke dalam suku bangsa Minang, Batak, Jawa, dan Sunda seperti yang terlihat dalam grafik berikut.

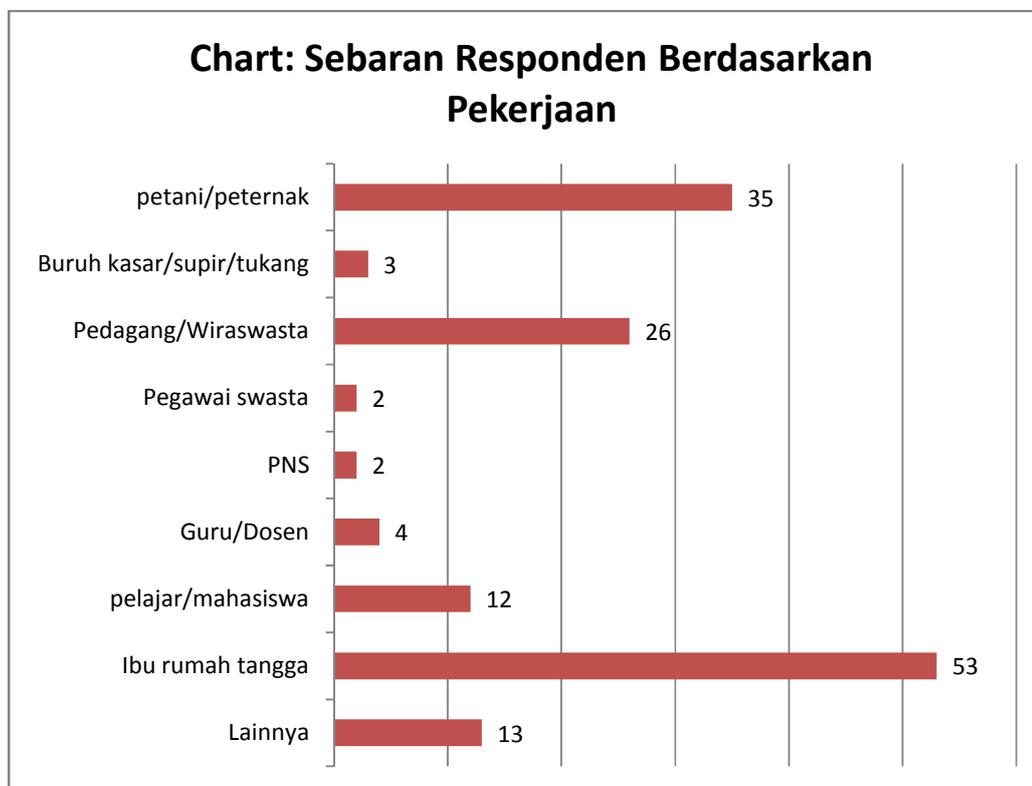


Suku responden yang ditemui di lapangan mayoritas adalah suku Minang yakni dari 150 orang responden ditemukan sebanyak 129 orang bersuku Minang, 9 orang bersuku Jawa, 1 orang bersuku Sunda dan 11 orang bersuku Batak, jadi diketahui bahwa sebanyak 86% responden berasal dari suku Minang, 6% dari suku Jawa, 0,7% dari suku Sunda, dan 7,3% berasal dari suku Batak.

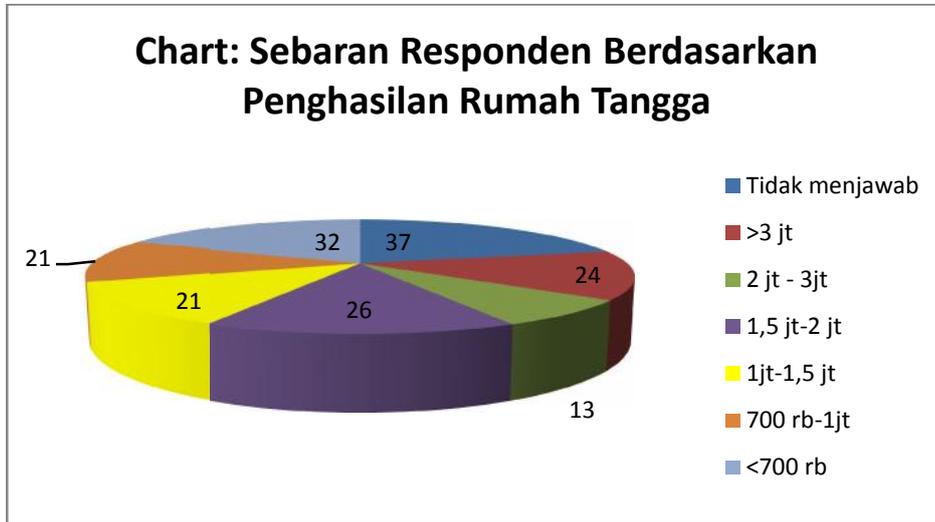
Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir responden sebanyak 41 orang tidak/lulusan SD, 39 orang lulusan SLTP, 52 orang lulusan SLTA, dan 18 orang lulusan D3 dan S1. Artinya sebanyak 27,3% tidak/lulusan SD, 26% lulusan SLTP, 34,7% lulusan SLTA, dan 12% lulusan D3 dan S1.



Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kab. Solok Selatan ditemukan jenis pekerjaan responden memiliki keragaman. Dari 150 responden ditemukan beragam pekerjaan yang mereka miliki diantaranya adalah sebanyak 35 orang petani/peternak, 3 orang buruh kasar/sopir/tukang, 26 orang pedagang/wiraswasta, 2 orang pegawai swasta, 2 orang PNS, 4 orang Guru/Dosen, 12 orang pelajar/mahasiswa, 53 orang Ibu rumah tangga dan 13 orang lainnya. Artinya sebanyak 23,4% petani/peternak, 2% Buruh kasar/supir/tukang, 17,3% Pedagang/Wiraswasta, 1,3% Pegawai swast , 1,3 % PNS, 2,7% Guru/Dosen, 8% pelajar/mahasiswa, 35,3%Ibu rumah tangga dan 8,7% lainnya.



Dari sisi penghasilan rata-rata responden per bulannya dapat dilihat grafik yang disajikan di bawah. Dari tabel dapat kita lihat bahwa penghasilan rumah tangga perbulan adalah sebanyak 32 orang berpenghasilan <700 ribu, 21 orang berpenghasilan 700 ribu – 1 juta, 21 orang berpenghasilan 1 – 1,5 juta, 26 orang berpenghasilan 1,5 – 2 juta, 13 orang berpenghasilan 2 – 3 juta, 24 orang berpenghasilan > 3 juta dan sebanyak 37 orang tidak tahu/tidak menjawab. Artinya sebanyak 21,3% berpenghasilan <700 ribu, 14% berpenghasilan 700 rb-1jt, 14% berpenghasilan 1jt-1,5 jt, 17,3% berpenghasilan 1,5 jt-2 jt, 8,7% berpenghasilan 2 jt – 3jt, 16% berpenghasilan >3 jt dan sebanyak 24,7 tidak tau/tidak menjawab.

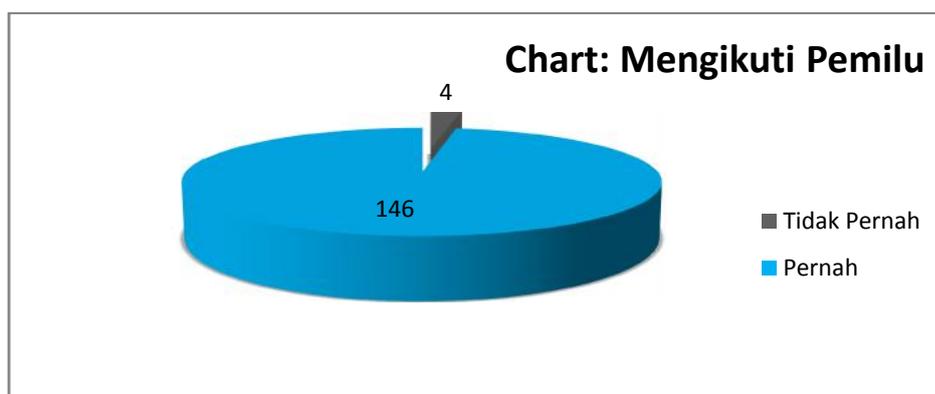


Karakteristik responden yang ditampilkan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi nyata responden sehingga mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap praktek politik uang dalam pemilu. Deskripsi ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran kondisi latar belakang responden, alasan responden menjawab sehingga analisa kualitatifnya lebih dalam bisa dilakukan. Selain itu untuk memberikan peluang untuk melakukan forecasting tentang kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk mengintervensi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga praktek politik uang bisa dihilangkan.

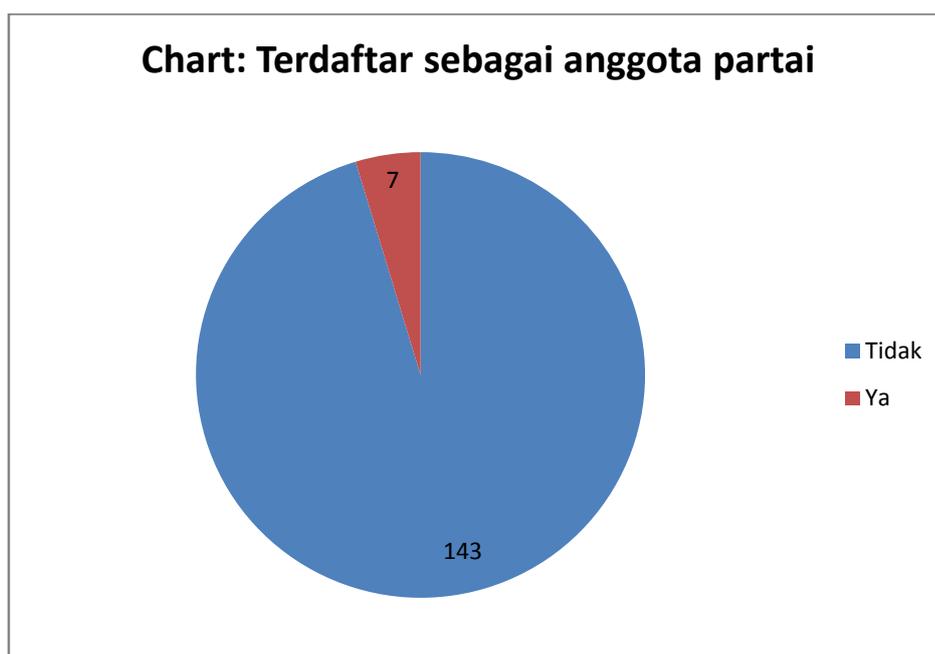
3. PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU

Untuk variabel pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi politik dalam pemilu dilihat dalam beberapa pertanyaan, yaitu mengenai keikutsertaan dalam pemilu, terdaftar sebagai anggota partai politik ataupun sebagai simpatisan partai politik, keterlibatan dalam pemilu 2014 dan kerelaan dalam menyalurkan hak pilih dalam pemilu 2014. Jawaban dari pertanyaan survey terkait hal-hal tersebut menggambarkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam PEMILU.

Berdasarkan survey di lapangan dapat dideskripsikan bahwa terkait dengan keikutsertaan dalam Pemilu dimana responden yang ditemui dilapangan sebanyak 146 orang responden yang mengatakan bahwa mereka sudah pernah mengikuti pemilu selama tinggal di Kabupaten Solok Selatan, dan 4 orang menyatakan belum pernah mengikuti pemilu. Artinya lebih dari 97,4 % masyarakat Kabupaten Solok Selatan pernah mengikuti pemilu. Dan sisanya 2,6 % belum pernah mengikuti pemilu.

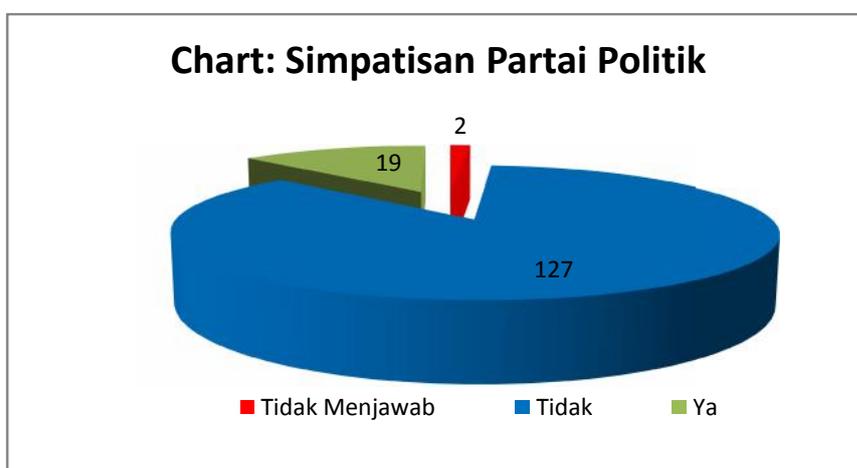


Data lapangan mengenai keikutsertaan atau keterlibatan dalam partai politik, dari 150 responden yang berhasil ditemui di Kab. Solok Selatan dimana terkait dengan status mereka apakah terdaftar sebagai anggota di salah satu partai politik atau tidak dapat dilihat pada chart di bawah. Dapat dijelaskan bahwa mayoritas atau sebanyak 143 orang yang mengaku tidak pernah terdaftar sebagai anggota parpol dan sisanya 7 orang mengakui bahwa mereka terdaftar dalam anggota sebuah partai politik. Artinya sebanyak 95,4% dari responden tidak terdaftar dalam partai politik dan 4,6% sisanya bergabung dalam partai politik.

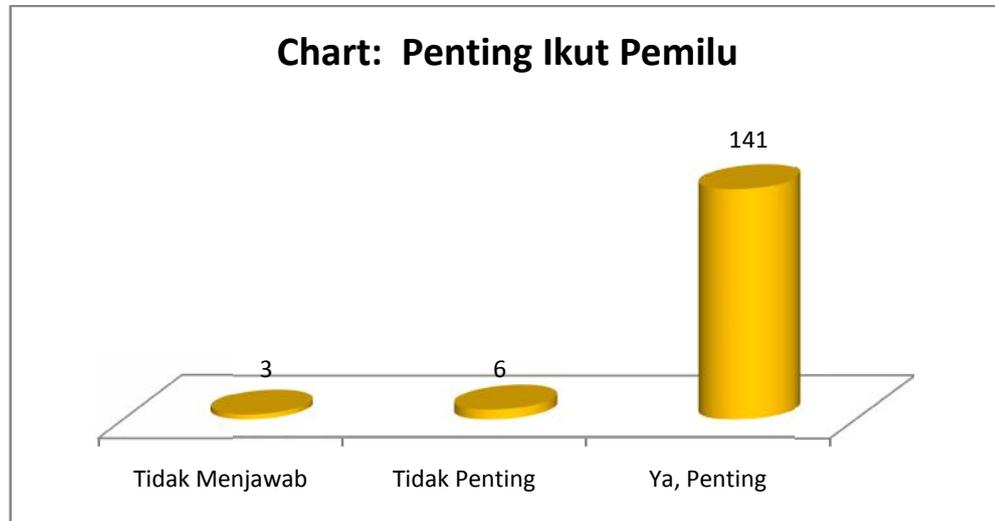


Sementara itu terkait dengan pertanyaan apakah responden merupakan simpatisan dari salah satu partai politik peserta pemilu dapat dijelaskan pada chart di bawah, dari 150 responden terdapat 127 orang yang mengaku bukan simpatisan partai politik, sisanya 19

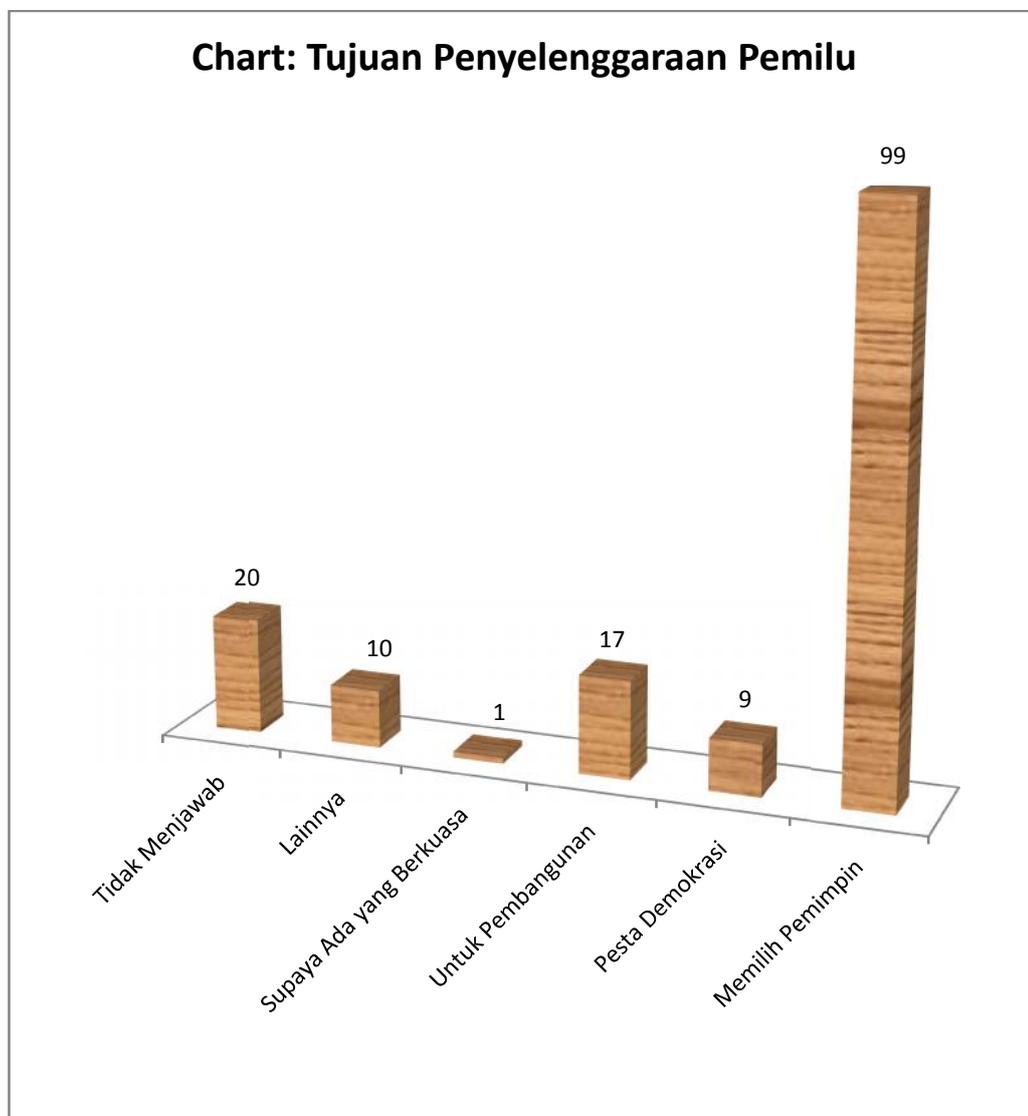
orang mengakui bahwa mereka adalah simpatisan partai politik, dan 2 orang tidak tahu/tidak menjawab. Artinya sebanyak 84,6% dari responden mengaku bukan simpatisan partai politik, 12,6% adalah simpatisan partai politik, dan 1,3 % sisanya tidak tahu/tidak menjawab terkait dengan pertanyaan yang diberikan.



Persepsi masyarakat tetan pentingnya keikutsertaan Pemilu menunjukkan bahwa dari 150 responden terdapat 141 orang yang mengatakan bahwa ikut pemilu itu penting, sisanya sebanyak 6 orang mengakui bahwa ikut pemilu itu tidak penting, dan 3 orang tidak tahu/tidak mau menjawab pertanyaan terkait dengan pentinnya keikutsertaan dalam pemilu. Artinya sebanyak 94% dari responden mengatakan bahwa ikut pemilu itu penting, 4% mengatakan bahwa ikut pemilu itu tidak penting, dan 2 % sisanya tidak tahu/tidak menjawab.



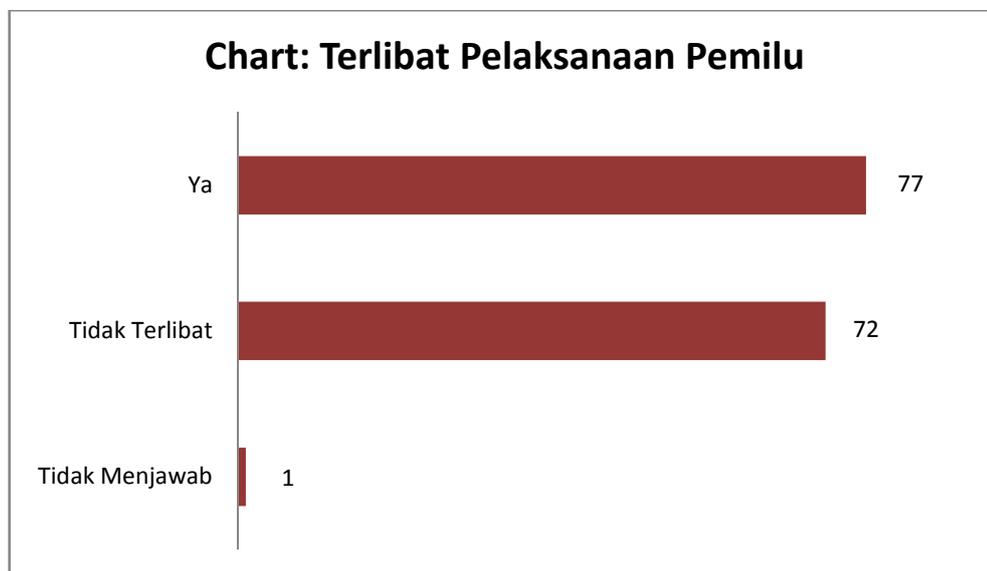
Sebaran jawaban responden tersebut memberikan penjelasan kepada kita, bahwa keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu dan persepsi responden terhadap pemilu tidak dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam partai politik. Dalam kata lain bisa disebutkan bahwa kesadaran responden terlibat dalam pemilu dan pengetahuan akan pemilu sudah baik.



Sedangkan untuk pertanyaan tujuan dari penyelenggaraan pemilu dimana hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar atau bahkan mayoritas dari responden yakni sebanyak 99 orang responden atau 54 % menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin. Jawaban terbanyak berikutnya adalah untuk pembangunan sebanyak 17 orang atau 11 % dan untuk pesta demokrasi sebanyak 9 orang

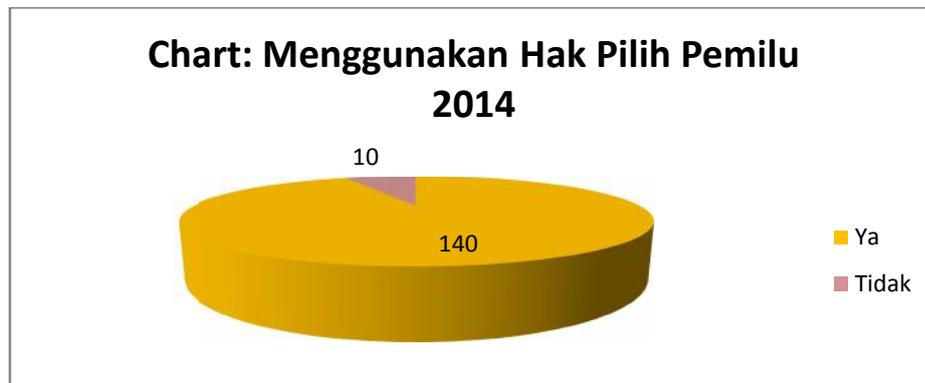
atau 6 %. Sementara itu sisanya sebanyak 1 orang responden atau 0,67 % menjawab tujuannya adalah untuk supaya ada yang berkuasa, 10 orang atau 6,67 % menjawab dengan alasan yang lain., dan responden yang tidak menjawab terdapat sebanyak 20 orang atau 13,33 %.

Terkait dengan pernah tidaknya masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pemilu, terlihat bahwa dari 150 responden terdapat 77 orang yang mengatakan bahwa mereka pernah terlibat pelaksanaan pemilu, sisanya 72 orang mengakui bahwa mereka tidak pernah terlibat pelaksanaan pemilu, dan 1 orang tidak tahu/tidak menjawab. Artinya sebanyak 51,4% dari responden mengatakan bahwa bahwa mereka pernah Terlibat Pelaksanaan Pemilu, 48 % mengatakan bahwa mereka tidak pernah Terlibat Pelaksanaan Pemilu, dan 0,6 % sisanya tidak tahu/ tidak menjawab.



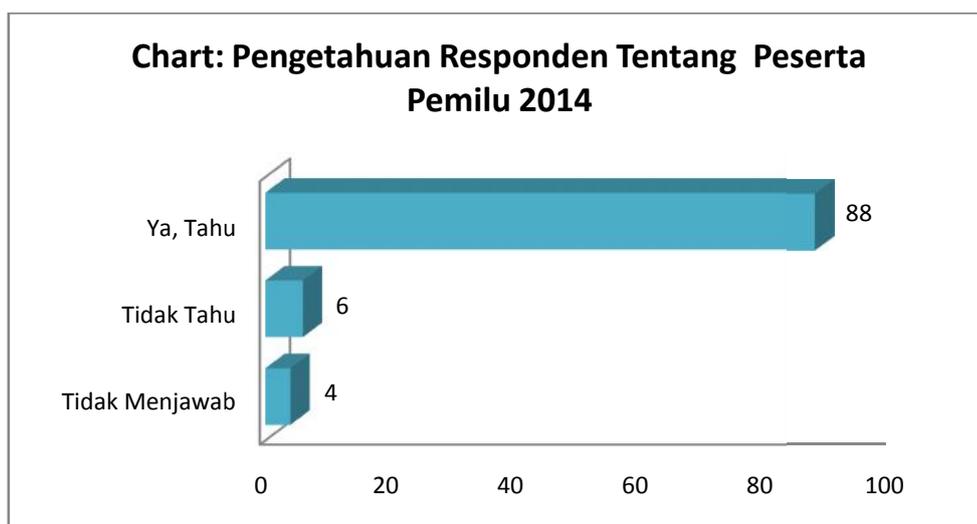
Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014 cukup tinggi yang diperlihatkan dari 150 responden terdapat 140 orang yang mengatakan bahwa

mereka menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, sisanya 10 orang mengakui bahwa mereka tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014. Artinya sebanyak 93,3 % dari responden mengatakan bahwa mereka Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu 2014, dan 6,7% mengatakan bahwa mereka tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu 2014.



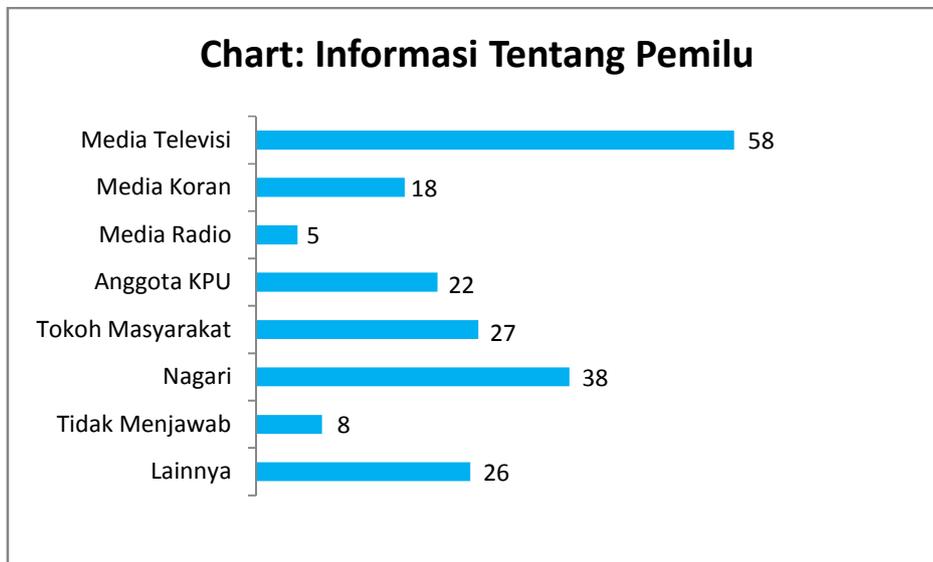
4 PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT

Untuk variabel perilaku memilih masyarakat dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden ditujukan untuk mendeskripsikan apakah keputusan pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada peserta pemilu tertentu. Hasil di lapangan terkait pengetahuan responden terhadap peserta pemilu seperti digambarkan dalam chart berikut ini.



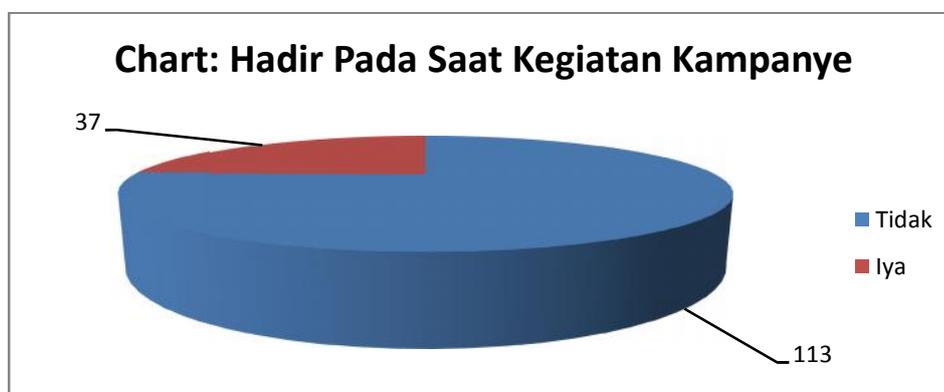
Dari 150 responden terdapat 90 orang yang mengatakan bahwa mereka mengetahui peserta Pemilu 2014, sisanya 56 orang mengakui bahwa mereka tidak mengetahui peserta Pemilu 2014, dan 4 orang tidak tahu/tidak menjawab. Artinya sebanyak 60% dari responden mengatakan bahwa bahwa mereka mengetahui peserta Pemilu 2014, 37,4% mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui peserta Pemilu 2014, dan 2,6 % sisanya tidak tahu/tidak menjawab. Kondisi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya

masih banyak responden atau 37,4 % responden memilih atau mencoblos dalam penyelenggaraan pemilu, tidak didasarkan pada pilihan rasional atas pengetahuan mereka terhadap peserta pemilu. Ditunjukkan dengan bukti bahwa responden tidak tahu siapa yang menjadi peserta pemilu, kondisi ini rentan untuk mendapat intervensi mobilisasi dalam penyelenggaraan PEMILU.



Sumber pengetahuan mereka terhadap informasi penyelenggaraan pemilu mayoritas responden yakni sebanyak 58 orang responden menjawab bahwa media elektronik televisi merupakan sumber informasi utama mereka dalam mengetahui informasi pelaksanaan pemilu. Jika dikaitkan dengan pekerjaan responden yang juga mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga, yang dalam observasi peneliti sebahagian waktunya dalam mengurus rumah tangga cenderung untuk di sambi dengan menonton televisi, maka ini dalah kondisi yang wajar sebagai sumber pengetahuan mereka akan pemilu adalah televisi.

Sumber informasi kedua adalah pemerintah nagari. Sebanyak 38 orang responden menyatakan bahwa pemerintah nagari adalah sumber informasi tentang pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah nagari menjadi sumber informasi yang cukup bisa diandalkan sebagai sumber informasi tentang pemilu. Sebagai daerah yang bersifat pedesaan, pemerintah nagari masih memegang peran dalam penyebarluasan informasi pemilu kepada masyarakat. Sumber informasi pemilu ketiga adalah tokoh masyarakat sebanyak 27 responden. Tokoh masyarakat terutama di daerah pedesaan masih memegang peran penting dalam penyebaran informasi tentang pemilu, disamping ada indikasi bahwa tokoh masyarakat masih menjadi panutan dan tempat bertanya bagi masyarakat. Sedangkan informasi pemilu dari anggota KPU hanya sebesar 22 orang responden. Persentase yang tidak tinggi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa KPU harus meningkatkan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu, sekaligus dapat bekerja sama dengan Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi tentang pemilu. Sumber informai yang cukup signifikan adalah media Koran sebanyak 18 orang dan media radio sebanyak 5 orang. Sumber informasi lainnya juga sangat tinggi yang mencapai 26 orang. Dan responden yang tidak menjawab sebanyak sebanyak 8 orang.



Dilihat dari kehadiran masyarakat dalam kampanye, dari 150 responden terdapat 37 orang yang mengatakan bahwa mereka pernah hadir kegiatan kampanye, sisanya 113 orang mengakui bahwa mereka tidak pernah hadir kegiatan kampanye. Artinya sebanyak 24,7 % dari responden mengatakan bahwa mereka pernah hadir kegiatan kampanye, 75,3% mengatakan bahwa mereka tidak mereka pernah hadir kegiatan kampanye. Ketidakhadiran dalam kampanye ini juga dipengaruhi jenis pekerjaan reponden, dimana responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil memang dilarang untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye.

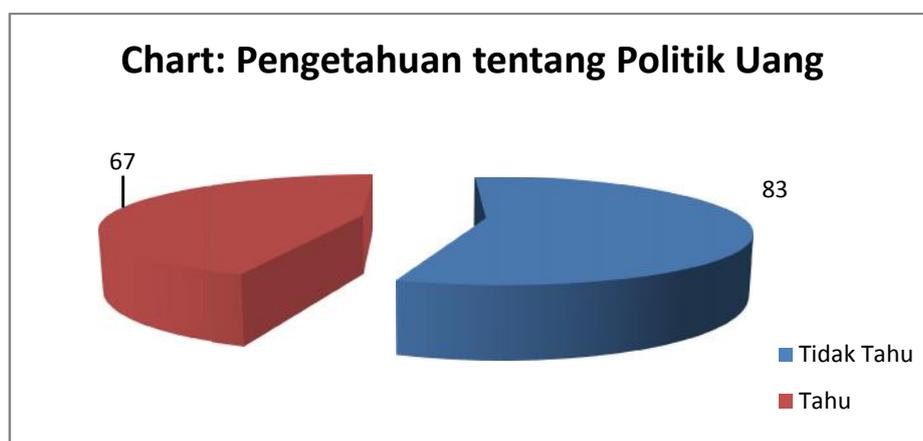


Peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 117 orang mengakui bahwa mereka tidak ikut serta ambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu. Sisanya sebanyak 30 orang yang mengatakan bahwa mereka menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu, dan sisanya sebanyak 3 orang tidak tahu/ tidak mau

menjawab pertanyaan tentang keterlibatan mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. Dalam bentuk prosentase, sebanyak 20 % dari responden mengatakan bahwa bahwa mereka menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu, 78 % mengatakan bahwa mereka tidak Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu, dan 2 % sisanya tidak tahu/ tidak menjawab.

5 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG

Menanyakan kepada responden tentang pengetahuannya terhadap politik uang di tujukan untuk bisa mendeskripsikan bahwa responden tahu atau mengenal politik uang. Data di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan responden terkait dengan politik uang cukup diketahui oleh sebagian besar responden. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan bahwa dari 150 responden terdapat 67 orang yang mengatakan bahwa mereka tahu tentang Politik Uang, sisanya 83 orang mengakui bahwa mereka tidak tau tentang Politik Uang. Artinya sebanyak 44,7 % dari responden mengatakan bahwa mereka tau tentang Politik Uang, 55,3 % mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Politik Uang. Seperti yang tergambar dalam chart berikut.



Pendapat responden tersebut pada dasarnya tidak bisa memberikan gambaran yang cukup komprehensif bagi peneliti. Hal yang menarik saat penelitian berlangsung terkait

dengan pengetahuan politik uang ini adalah ketika salah seorang responden, setelah selesai wawancara menambahkan informasi

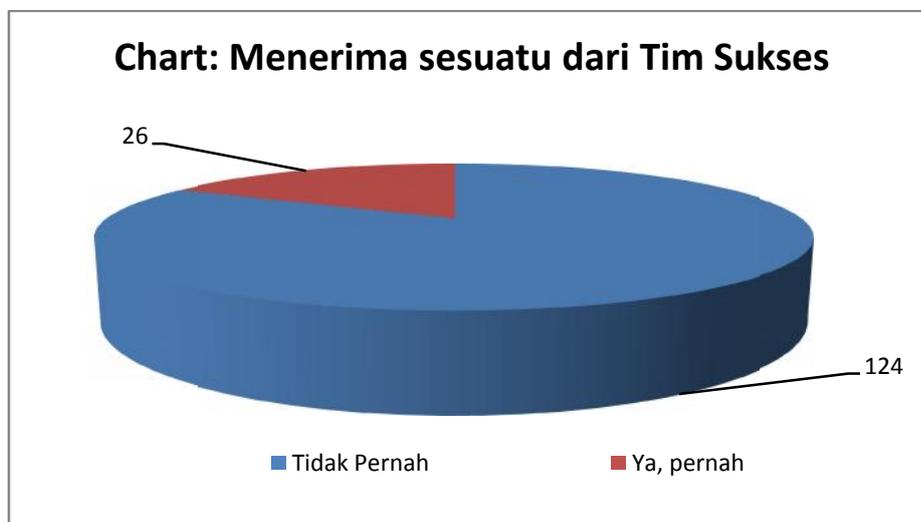
Kalau ka politik uang ko adiak tanyoan, yo ndak akan ado urang siko ka manjawab jujur doh diak, tapi adiak jaan picayo se karano sabananyo ado, ambo se pas adik tanyo tadi jawab ambo ndak tau, tapi nyo adoh mah diak, kan ndak mungkin lo diagiah tau ka urang baa prosesnyo.

(Kalau mengenai politik uang ini di tanya, saya merasa tidak ada yang akan mau berbicara jujur, tetapi anda sebagai peneliti jangan percaya begitu saja, karena sebenarnya politik uang itu ada. Saya sendiri misalnya saat di wawancara tadi menjawab tidak tau, tetapi yang sebenarnya ada, karena tidak mungkin saya menceritakan bagaimana prosesnya).

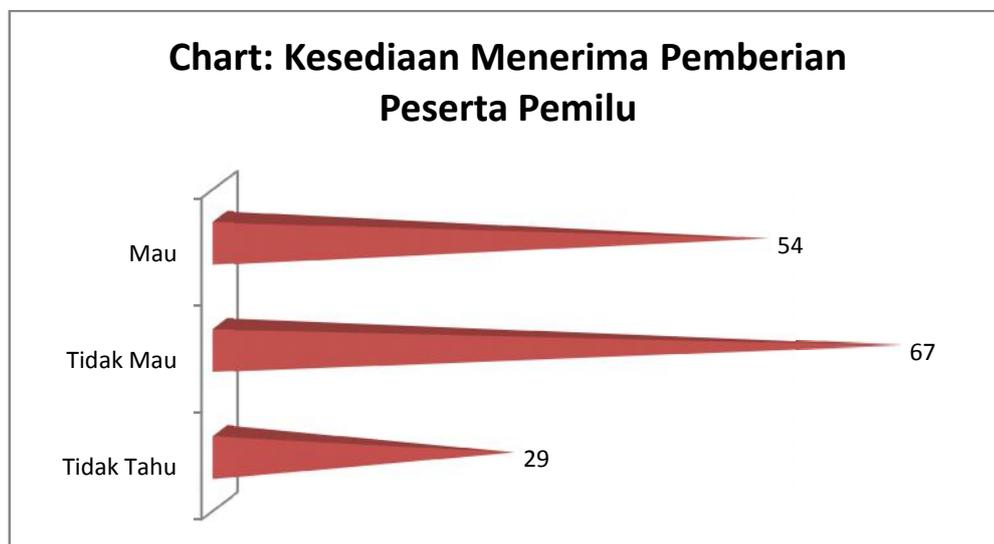
Tanggapan responden yang seperti itu sengaja peneliti beri tempat khusus dalam analisis penelitian ini, mengingat begitu sangat rahasianya praktek politik uang. Dalam pertanyaan lain, tentang pola politik uang peneliti mencoba mencari tahu pola politik uang yang terjadi di tengah lingkungan responden. Melalui pertanyaan apakah Rumah responden pernah didatangi oleh peserta atau para kontestan pemilu. Bahwa dari responden yang disurvei sebagian besar mengatakan bahwa mereka selama pemilihan umum tidak pernah didatangi kerumahnya oleh peserta atau para kontestan pemilu. Ini terlihat dari data hasil survey yang mana dari 150 orang responden sebanyak 99 orang responden atau 66 % menjawab bahwa mereka tidak pernah didatangi. Sementara sisanya sebanyak 35 orang responden atau 23,3 % responden mengatakan bahwa mereka pernah didatangi oleh peserta pemilu kerumahnya. Sisanya sebanyak 16 orang responden atau 10,7% tidak menjawab.



Fakta ini sebenarnya memberikan pertanyaan baru terhadap kita semua, apa yang di pahami Responden sebagai politik uang, dan seperti apa itu dilakukan. Ketika 66 persen responden menjawab bahwa rumahnya tidak pernah didatangi oleh peserta pemilu, ataupun dari tim sukses peserta pemilu. Dalam pendalaman melalui wawancara peneliti menemukan fakta bahwa benar adanya responden tidak didatangi ke rumah-rumah oleh peserta pemilu dan atau oleh tim suksesnya, karena praktek politik uang terjadi melalui pendekatan tokoh. Hal itu terungkap ketika pengetahuan responden itu diperdalam dengan pertanyaan apakah menerima sesuatu pemberian dari tim sukses/ peserta pemilu. Data di lapangan didapat bahwa sebanyak 124 responden atau 82,7 % menjawab bahwa mereka tidak pernah menerima sesuai atau pemberian apapun dari tim sukses/peserta pemilu. Sementara itu sisanya sebanyak 26 orang responden atau 17,3 % menjawab bahwa mereka pernah menerima sesuatu dari tim sukses/peserta pemilu.



Akan tetapi data ini agak berbeda ketika pengetahuan responden tersebut lebih digali dengan pertanyaan Apakah Ibu/Bapak/Saudara mau menerima pemberian (uang, barang dan lain-lain) dari peserta pemilu? Dari 150 responden terdapat 54 orang atau 36 % yang mengatakan bahwa mereka bersedia menerima pemberian peserta pemilu, sisanya 67 orang atau 44,7 mengakui bahwa mereka tidak bersedia menerima pemberian peserta pemilu, dan 29 orang atau 19,3 % tidak tahu/tidak menjawab. Seperti yang digambarkan dalam chart di bawah ini.

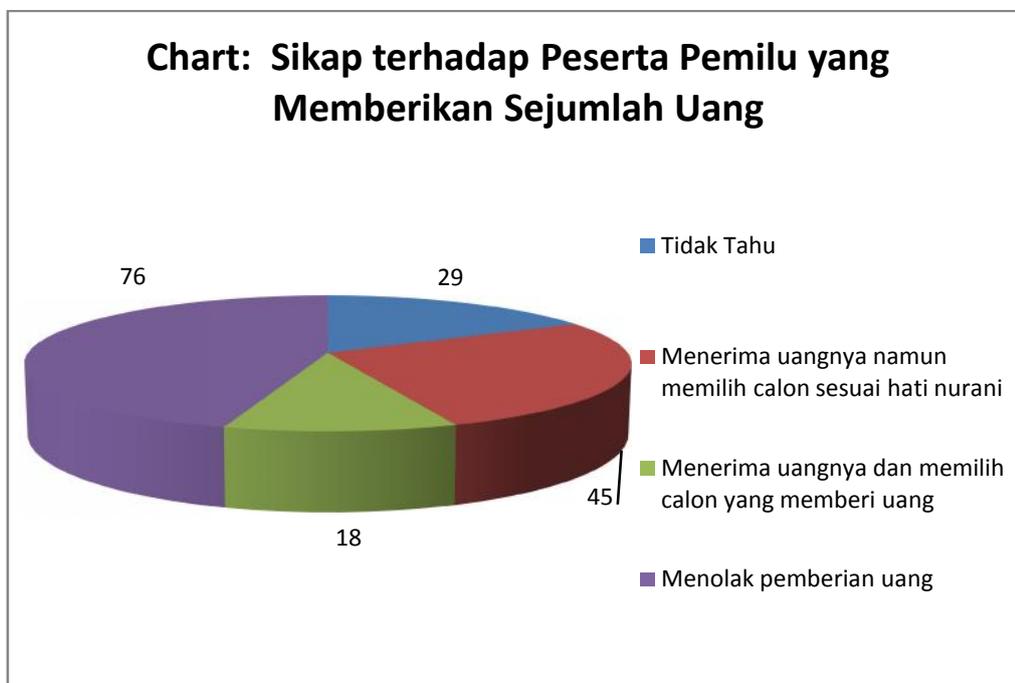


Ada hal yang berbeda terungkap di lapangan dari data kuantitatif, bahwa ketika 82,7 % responden mengaku menjawab tidak pernah menerima sesuatu dari tim sukses, dan dari sikap mereka terhadap pemberian dari tim sukses peserta pemilu adalah menjawab 36% mau menerima. Ada ketidak konsistenan jawaban responden, Hal ini di pengaruhi oleh ke sensitifan isu politik uang seperti yang di ungkap oleh salah seorang responden berikut.

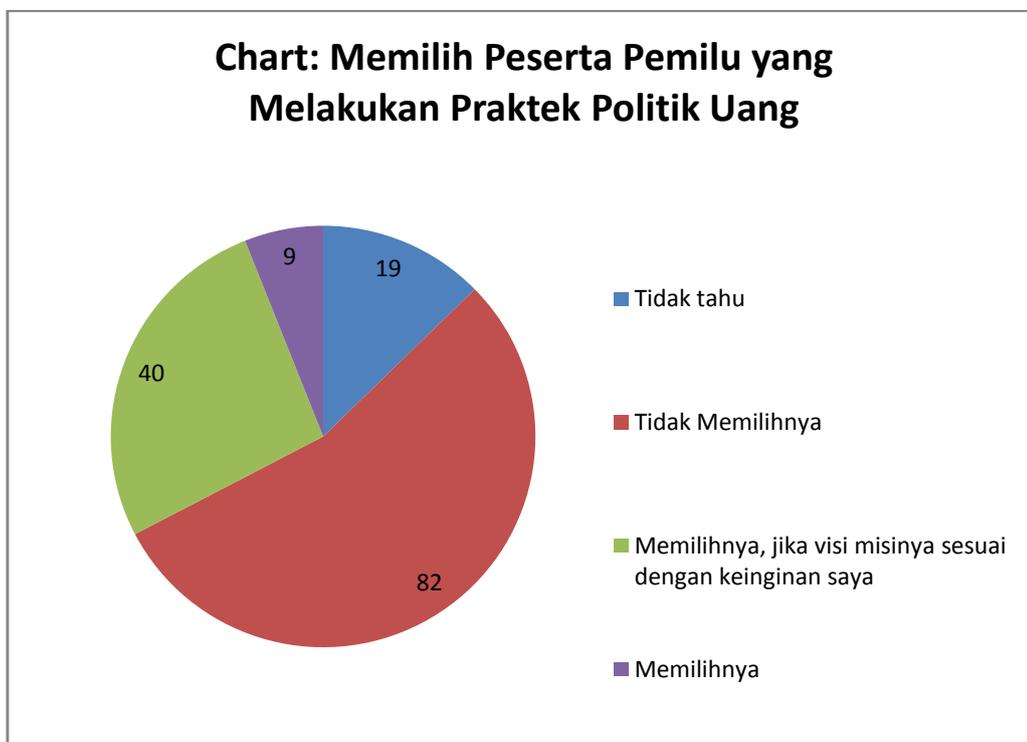
Kami ragu ka mancaritoan baa sabananya, kok kadikatoan hampia sadoe masyarakat siko manarimo pitih saat pemilu, kok ndak dari calon nan iko, pasti dari partai nan iko, masing-masing tampek disiko lah ado kapliangannyo. Kok di tanyo sadoe manjawab indak mah

(Kami ragu untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, kalau mau diceritakan, hamper semua masyarakat di sini (lokasi penelitian-pen) menerima uang saat pemilu, menerimanya macam-macam ada dari calon yang berbeda atau partai yang berbeda, masing-masing tempat di sini sudah ada kapliangannya. Tetapi kalau ditanya, semua akan menjawab tidak).

Data lainnya adalah tentang sikap responden terhadap peserta pemilu memberikan uang. Dari 150 orang responden sebanyak 76 orang responden atau 50,7 % menyatakan sikap bahwa mereka menolak pemberian uang oleh peserta pemilu. Sementara itu sebanyak 55 responden atau 30 % menyatakan sikap lain yakni mereka akan menerima uang yang diberikan oleh peserta pemilu namun tetap akan memilih calon yang sesuai dengan hati nuraninya. Cukup tinggi juga responden yang tetap memilih peserta pemilu yang memberinya uang yakni sebanyak 18 orang responden atau 12 % yang menyatakan bahwa mereka akan memilih peserta pemilu yang memberikan uang kepadanya. Dan sisanya sebanyak 29 orang responden atau 19,3 % tidak memberikan jawaban. Sebaran jawaban responden ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa kesediaan responden untuk menerima pemberian dari tim sukses peserta pemilu di pengaruhi oleh kondisi ekonomi responden cukup tinggi yaitu sebesar 12%. Responden dengan pendapatan per bulan tidak lebih dari satu juta rupiah memilih untuk menerima pemberian dari tim sukses peserta pemilu. Sejumlah 30 % responden menjawab bahwa akan menerima uang dari tim sukses peserta pemilu namun akan tetap memilih sesuai dengan hati nurani, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang pendidikan responden.



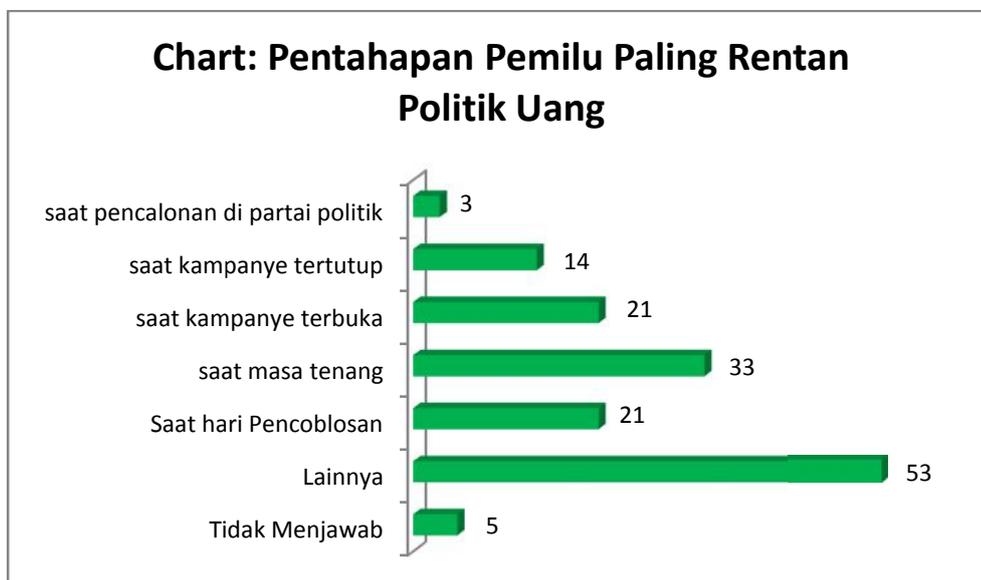
Sikap masyarakat terhadap peserta pemilu yang melakukan politik uang dapat dijelaskan bahwa dari 150 responden terdapat 9 orang atau 6 % yang mengatakan bahwa mereka memilih calon yang memberi uang, sisanya 40 orang atau 26,7 % tetap memilih calon yang memberi uang dengan syarat jika visi misinya sesuai dengan keinginan nya. Sisanya sebanyak 82 orang atau 54,7 % tidak memilih calon yang memberi uang dan 19 orang atau 12,6 % tidak tahu/ tidak menjawab pertanyaan ini.



Tentunya ketidakkonsistenan jawaban responden, atau jawaban-jawaban yang peneliti dapatkan di luar proses wawancara adalah menjadi data penting dalam penelitian ini, data tersebut peneliti rekam dalam data observasi atau pengamatan. Dan data tersebut harus mendapat pertimbangan khusus nantinya saat membuar rekomendasi kebijakan. Bahwa saat responden menjawab tidak tahu atau tidak menerima politik uang belumlah sebenarnya menggambarkan apa yang dialami oleh responden tersebut. Tentu dalam pembuatan kebijakan ini harus jadi pertimbangan, mengingat isu politik uang adalah isu umum yang setiap orang tidak ingin mengakuinya.



Terkait waktu yang paling sering terjadinya praktek politik uang, dari 150 responden menjawab selama masa kampanye terbuka sebanyak 23 orang atau 15,3 %, selama masa kampanye tertutup sebanyak 10 orang atau 6,7 %, Pada masa tenang sebanyak 19 orang atau 12,7 %, pagi hari sebelum pemilihan sebanyak 37 orang atau 24,6%. Sisanya tidak tahu/ tidak menjawab sebanyak 54 orang atau 36 %, dan 7 orang atau 4,7 % menjawab pada waktu lainnya. Masa yang paling rentan untuk terjadinya politik uang adalah pada pagi hari sebelum pemilihan. Waktu rentan berikutnya adalah pada masa kampanye dan pada masa tenang.



Terkait Pentahapan Pemilu yang Paling Rentan Politik Uang, masa tenang adalah masa yang paling rentan terhadap politik uang. Dari 150 responden didapatkan hasil bahwa masa dalam pentahapan pemilu yang rentan terhadap politik uang memperlihatkan data sebanyak 3 orang atau 2 % menyatakan saat pencalonan di partai politik, 14 orang atau 9,3% menyatakan selama masa kampanye terbuka, sebanyak 21 orang atau 14 % menyatakan Selama masa kampanye tertutup, 33 orang atau 22 % menyatakan pada saat masa tenang, 21 orang atau 14 % menyatakan saat hari pencoblosan. Sisanya sebanyak 53 orang atau 35,3 % menyatakan pada masa lainnya dan 5 orang atau 3,4 % orang tidak menjawab pertanyaan ini.

Terkait dengan cara tim sukses melakukan praktek politik uang masing-masing responden memberikan jawabannya sesuai dengan tabel di bawah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebanyak 55 orang responden atau 36,7 % menjawab bahwa cara yang digunakan oleh tim sukses/ peserta pemilu melakukan praktek politik uang dengan

langsung datang ke rumah-rumah. Sedangkan sebanyak 17 responden atau 11,3 % menjawab pada saat kampanye dan hanya 15 orang responden atau 10 % yang menjawab sebelum saat mencoblos. Ada 2 orang responden atau 1,3 % menjawab bahwa cara melakukan praktek politik uang itu dilakukan melalui tokoh masyarakat. Sisanya sebanyak 58 orang responden atau 38,7 % yang menjawab dengan cara lainnya dan 3 orang responden atau 2 % tidak mau menjawab.



Jawaban responden ini bertolak belakang dengan pertanyaan yang sebelumnya dibahas pada bahagian depan laporan ini, yaitu responden menjawab bahwa rumah mereka tidak pernah didatangi oleh tim sukses peserta pemilu. Kondisi yang bertolak belakang ini sangat besar pengaruhnya karena praktek politik uang ini bersifat rahasia yang di ketahui oleh publik. Dalam sebuah kutipan wawancara responden menyampaikan bahwa:

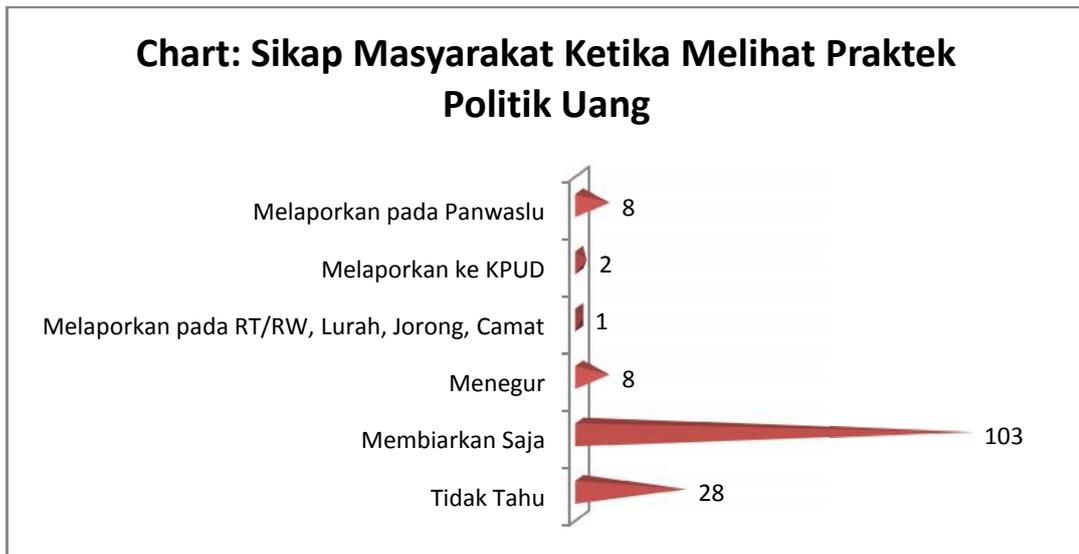
Apo akibat o beko ka kami ko, kalo manjalehan iko? Lai ndak berang tu ka kami ko?

“apa akibatnya nanti ke kami (responden-peneliti)? Apa mereka (pemberi politik uang-peneliti) nanti tidak marah ke kami?”

Dan selama proses pengumpulan data di lapangan cukup banyak responden yang tidak mau diwawancara, atau mau diwawancara akan tetapi setelah tahu bahwa ini banyak bertanya tentang politik uang calon responden merasa harus membatalkan proses wawancara, dan tidak mengizinkan datanya dicatat. Akan tetapi peneliti merasa perlu mendeskripsikan kondisi ini, walaupun itu didapat dari mereka yang bukan responden. Ini adalah hasil observasi terhadap *gesture* dan mimik wajah, keengganan orang di wawancara karena menganggap ini isu yang sebaiknya tidak dibicarakan.

Sikap malu-malu dan sikap takut responden dalam mengungkapkan cara yang dilakukan tim sukses peserta pemilu dalam melakukan praktek politik uang adalah juga untuk mengamankan keberadaan responden sendiri, agar tidak dikategorikan sebagai penerima politik uang. Responden menyangkal bentuk pertanyaan pernah menerima praktek politik uang, akan tetapi dengan pengetahuannya responden mampu mendeskripsikan dimana dan kapan saja praktek politik uang biasa terjadi. Dan responden khawatir jika nantinya cerita yang mereka sampaikan akan membahayakan mereka atau memancing kelompok yang memmberi politik uang menjadi marah, dan berakibat mereka tidak lagi menerima politik uang. Kondisi ini jika dikaitkan dengan latar belakang ekonomi, pendidikan dan pekerjaan responden, maka praktek politik uang lebih kepada factor memanfaatkan kesempatan yang ada, dalam konteks kebetulan ada yang mau bagi-bagi uang.

Terkait dengan sikap responden apabila mereka mengetahui adanya praktek politik uang. Sebagian besar responden atau sebesar 103 orang responden atau 68,7 % mengatakan sikap mereka yakni dengan membiarkan saja atau pura-pura tidak tahu dengan praktek politik uang tersebut. Respon berikutnya dengan jumlah yang sama adalah menegur langsung praktek politik uang tersebut dan melaporkan kasus praktek politik uang yang terjadi kepada Panitia Pengawas Pemilu PANWASLU, sebanyak 8 orang atau 5,3 %. Hanya ada 2 responden atau 1,3 % yang mau melaporkan ke KPUD dan 1 orang responden atau 0,7 % melaporkan kepada Camat. Sisanya sebanyak 28 orang responden atau 18,7 5 tidak mau menjawab pertanyaan ini.



Ini menggambarkan kepada kita dengan tingkat pengetahuan dan kekhawatiran yang tinggi dari responden terhadap ancaman yang mungkin dapat mengenai dirinya responden memilih untuk membiarkan saja praktek politik uang. Selain itu faktor pendidikan responden sangat berpengaruh terhadap kondisi ini.

Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap peserta pemilu yang melakukan politik uang diperoleh data bahwa motivasi atau alasan dari tim sukses/peserta pemilu melakukan praktek politik uang adalah bahwa 86 orang responden atau 57,3 % menjawab peserta pemilu tidak populer tapi ingin menang. Inilah jawaban yang dominan bahwa politik uang cenderung dilakukan oleh peserta pemilu yang tidak populer di masyarakat tapi ingin menang dalam kancah pemilu. Sebanyak 12 orang responden atau 8 % menyatakan bahwa disebabkan karena Peserta Pemilu Lainnya melakukan hal yang sama. Sedangkan yang memilih alasan bahwa mereka tidak punya program tapi ingin menang sebanyak 2 orang responden atau 1,3 %. Sebanyak 8 orang responden atau 5,4 % dengan alasan yang lain yang tidak tersebut dalam daftar jawaban. Sisanya sebanyak 42 orang responden atau 28 % menjawab bahwa mereka tidak tahu alasannya.



Jawaban responden ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya responden paham dan mengerti mengapa terjadi praktek politik uang, hanya responden tidak mau dan menolak mendeskripsikan bentuk-bentuk praktek politik uang yang mereka terima, dengan alasan bahwa itu akan mengganggu kenyamanan mereka. Sikap responden yang mendiamkan praktek politik uang salah seorang responden menjelaskan;

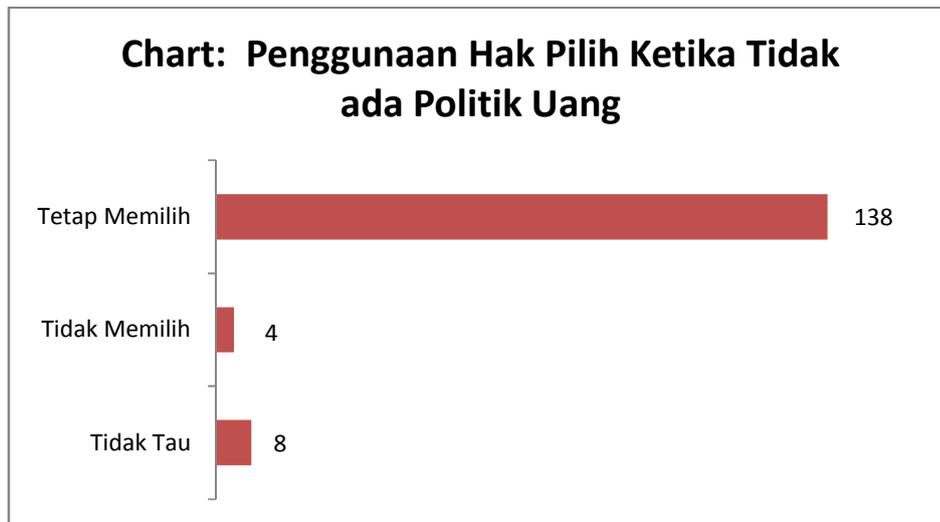
“ka sia ka di laporkan diak? Sado urang tu dapek bagian, mungkin gadang untuk inyo pado kami lai, ancak diam se wak, tarimo se kok ado nan ka maagiah.”

Mau dilaporkan ke siapa? Semua orang di luar sana juga menerima bagiannya, mungkin yang mereka terima lebih besar dari yang kami terima, lebih baik kita diam, kita terima saja jika memang ada yang mengasih.

Gambaran itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa responden menyadari bahwa praktek politik uang tidak hanya terjadi pada dirinya, tapi juga pada orang-orang di luar lingkungannya. Sehingga pilihan sikap yang di pilih oleh responden adalah mendiamkan dan yang perlu di sayangkan adalah kemudian terlibat dengan menerima pemberian politik uang tersebut.

Sementara itu mengenai sikap responden jika tidak ada calon peserta pemilu yang memberikan politik uang apakah mereka akan tetap menggunakan hak pilihnya atau tidak. Dari hasil survey diketahui bahwa sebanyak 138 responden atau 92 % menyatakan bahwa mereka akan tetap menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu meskipun tidak ada calon yang memberikan politik uang kepada mereka. Sementara itu sebanyak 4 orang responden

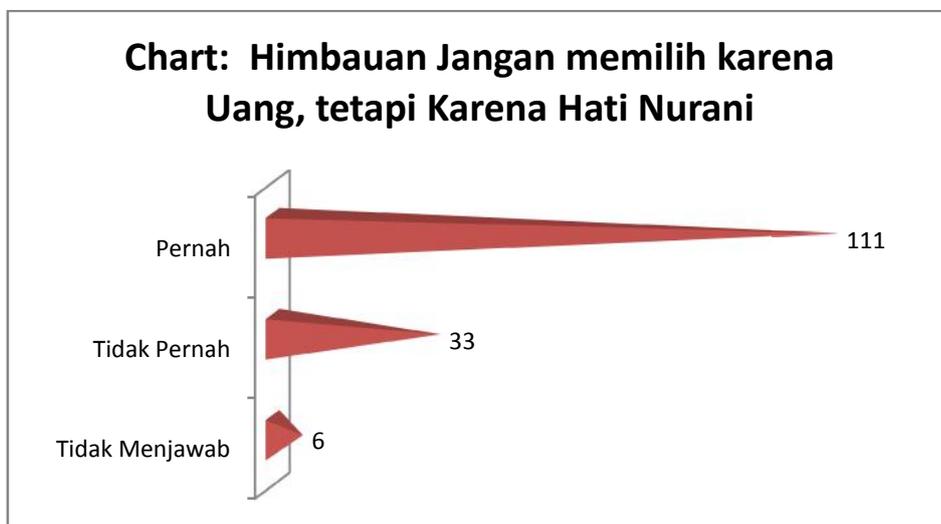
atau 2,7 % menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak suaranya dan sisanya sebanyak 8 orang responden atau 5,3 % tidak menjawab.



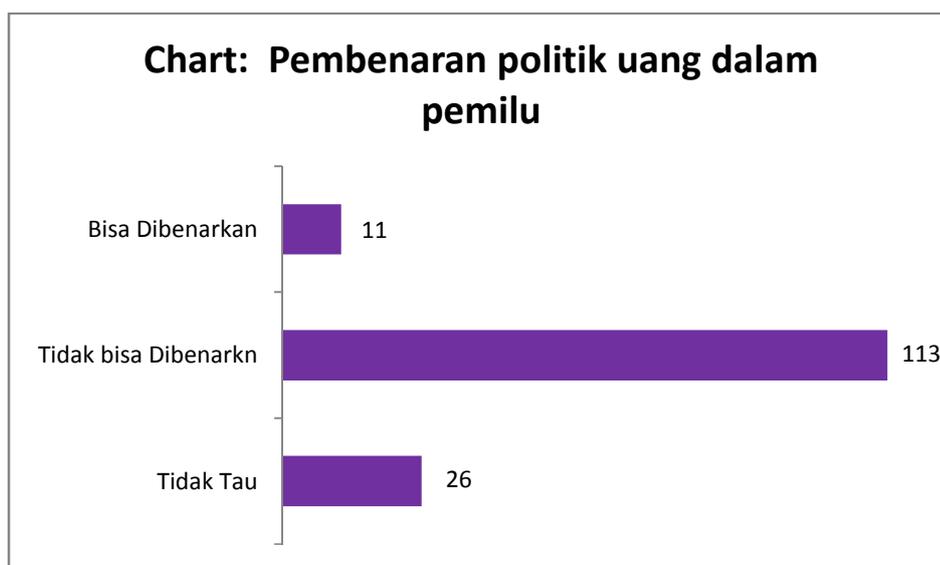
Jawaban responden tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa kesadaran responden untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak dipengaruhi oleh politik uang. Masyarakat cenderung berada dalam posisi menerima. Dan untuk sikap dan keinginan dari responden terkait dengan pelaksanaan pemilu yang bersih dan bebas dari praktek politik uang dapat dijelaskan dari chart di bawah. Sebagian besar responden atau sebanyak 132 orang responden atau 88 % menyatakan setuju dan memiliki keinginan. Sebanyak 8 rang responden atau 5,3 % menyatakan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Sementara itu hanya 1 orang responden atau 0,7 % yang tidak menginginkan pemilu itu bersih dari praktek politik uang dan sisanya sebanyak 9 orang responden atau 6 % tidak menjawab.



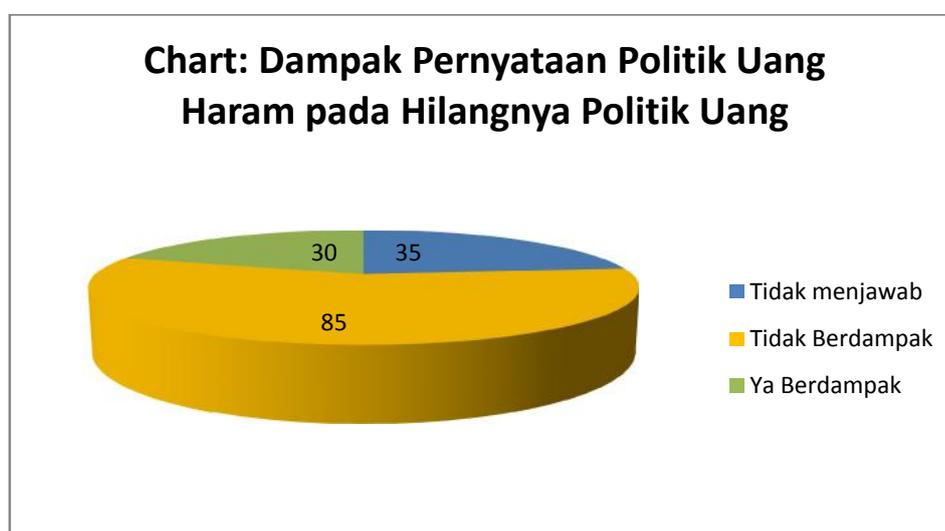
Tentunya keinginan responden untuk pemilu yang bebas dari praktek politik uang, harus didukung dengan sistem yang baik, dengan melakukan inovasi. Sehingga masyarakat tidak lagi bersikap apatis terhadap kondisi tersebut. Dalam strategi untuk bebas dari politik uang yaitu himbauan untuk jangan memilih karena uang tapi pilih dengan hati nurani ini sebagian besar responden yang disurvei menjawab bahwa mereka pernah mendengar slogan tersebut. Adapun jumlah responden yang menjawab pernah ini sebanyak 111 orang responden atau 74%. Sementara sisanya sebanyak 33 orang responden atau 22 % responden menjawab tidak pernah tahu atau mendengar slogan tersebut dan sisanya 6 orang responden atau 4 % menjawab tidak tahu.



Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pebenaran politik uang dalam pemilu memperlihatkan data bahwa dari 150 responden ditemukan sebanyak 11 orang atau 7,3 % yang menyatakan bahwa politik uang itu bisa dibenarkan, 113 orang atau 75,3 % menyatakan bahwa politik uang tersebut tidak dapat dibenarkan, dan 26 orang atau 17,4 % menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab.



Ini menunjukkan kepada kita bahwa KPU sebagai penyelenggara ataupun pihak lainnya sudah mencoba mengkampanyekan agar menolak politik uang. Tapi sebagai sebuah transaksi, dimana ada permintaan pada saat itu disediakan barang, maka praktek politik uang masih terus terjadi. Sedangkan terkait dengan persepsi responden terhadap dampak politik uang itu haram sebagian besar responden menjawab tidak akan memiliki dampak. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey bahwa sebanyak 85 orang responden atau 56,7 % menyatakan bahwa walaupun politik uang itu haram namun tetap tidak akan memiliki dampak yang positif. Sementara sisanya sebanyak 30 orang responden atau 20 % menyatakan bahwa hal ini akan berdampak. Sementara sisanya sebanyak 35 orang responden atau 23,3 % menjawab tidak tahu/ tidak memberikan jawaban.

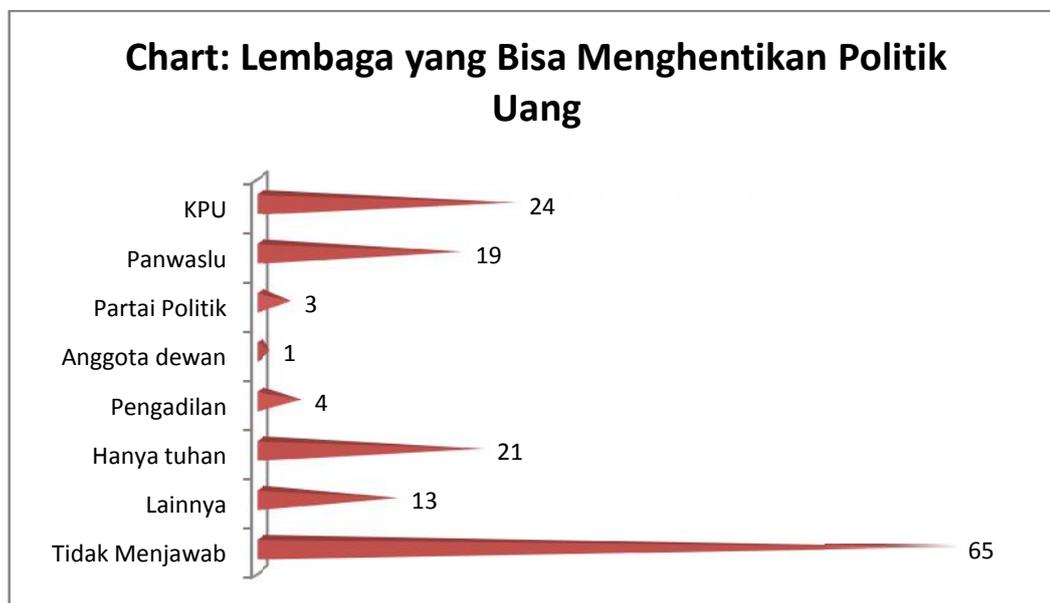


Bagi responden menyatakan praktek politik uang tidak sebagai sesuatu yang haram tidak akan berpengaruh, karena semua orang selama ini terlibat dan tahu kondisi tersebut, tapi semua orang memilih diam.

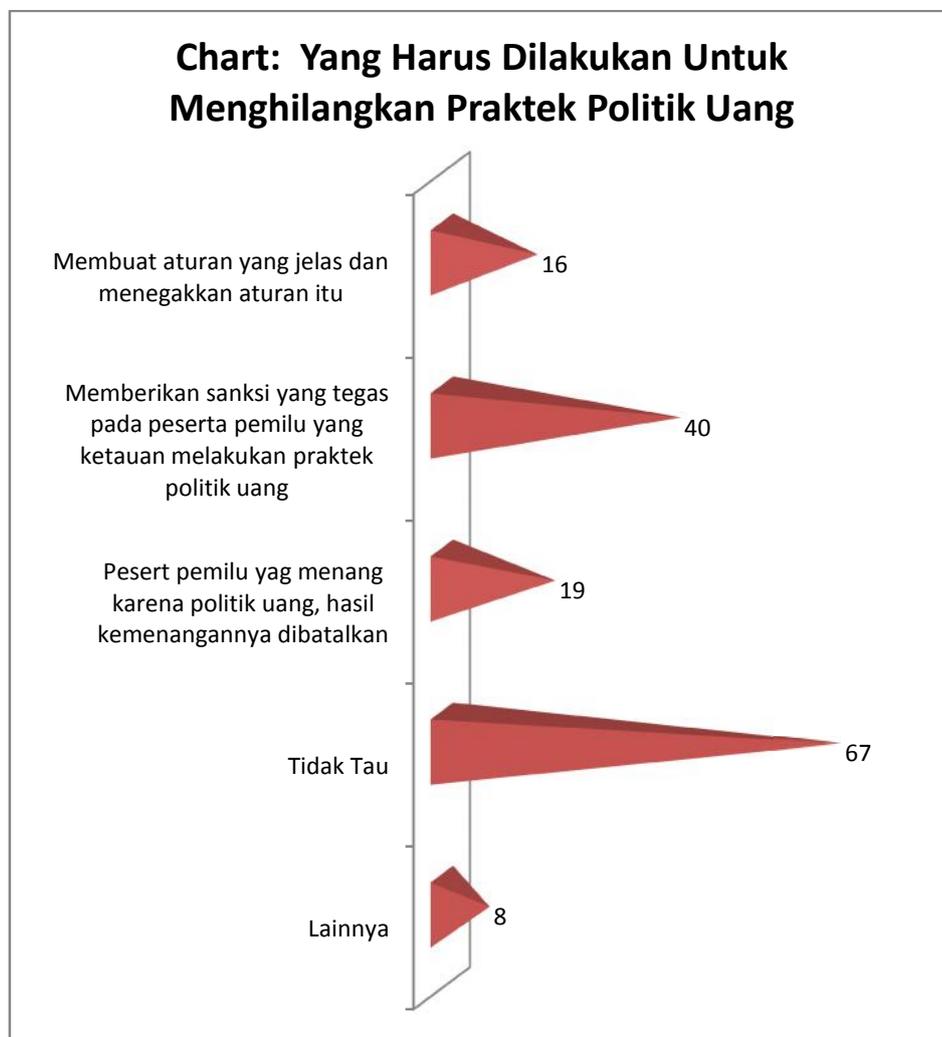
"nan mangecekan haram tu sato lo mah diak, mungkin inyo nan banyak, kini ko lah samo se diak dek nak jadi benjabat ko, mokalino di cubo dek urang, dan mokalino orang diam".

Yang bilang haram itu ikut pula dalam praktek politik uang itu, dan mungkin dia yang dapat lebih banyak, saat sekarang ini semuanya sudah sama saja, karena ingin jadi penjabat (penguasa-peneliti) semua cara di coba, dan semua orang diam.

Mengenai pertanyaan siapakah yang bisa menghentikan praktek politik uang yang terjadi pada pemilu ini bisa dilihat dari chart di bawah. Dapat dijabarkan bahwa mayoritas responden justru menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dengan jumlah sebanyak 65 responden atau 43,4 %. Lembaga yang diyakini mampu menghentikan politik uang ini adalah lembaga KPU dengan jawaban sebanyak 24 orang responden atau 16 % dan lembaga Panwaslu sebanyak 19 orang Panwaslu atau 12,7 %. Sementara Tuhan dan pengadilan masing-masing dijawab oleh 21 orang responden atau 14 % dan 4 orang responden atau 2,7 %. Sisanya partai politik, anggota dewan, dan pihak lainnya masing-masing hanya dijawab oleh responden sebanyak 3 orang (2 %), 1 orang (0,7 %), dan 13 (8,7 %) orang saja.



Mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatasi praktek politik uang ini adalah sebagai berikut. Sebagian besar responden menjawab bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi yang tegas pada peserta pemilu yang ketahuan melakukan praktek politik uang. Ini dijawab oleh 40 orang responden atau 26,7 %. Sebanyak 19 responden atau 12,7 % yang menjawab bahwa jika ketahuan maka hasilnya harus dibatalkan. Sementara itu sebanyak 16 responden atau 10,7 % menjawab bahwa penyelenggara pemilu harus membuat aturan yang jelas dan menegakkannya. Sisanya sebanyak 8 Responden atau 5,3 % menjawab dengan cara yang lainnya, dan 67 orang responden atau 44,7 % menjawab tidak tahu.



Bagi responden yang bisa dilakukan untuk menghilangkan praktek politik uang adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan juga dengan membatalkan hasil pemilihan umum. Ada yang menarik saat wawancara, salah seorang responden mengatakan:

"supaya jaan adoh juo yang bagi-bagi pitih pas pemilu ko, rancaknyo pemilu ko jaan malibatkan partai politik lai, "

Supaya jangan ada yang bagi-bagi uang dalam pemilu, sebaiknya pemilu itu tidak lagi melibatkan partai politik.

Apa yang disampaikan responden ini tentu tidak bisa langsung dijadikan rekomendasi, mengingat dalam Negara demokrasi, keberadaan partai politik adalah posisi penting, yang bisa dilakukan terkait dengan politik uang ini dalah melakukan pendidikan politik dengan lebih baik, dan meningkatkan fungsi positif dari partai politik.

6 KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat tentang perlunya partisipasi dalam pemilu dan pentingnya pemilu untuk pembangunan perlu bentuk sosialisasi dan proses pendidikan politik yang beragam kepada masyarakat. Perlunya keragaman bentuk sosialisasi dan proses pendidikan politik tersebut disebabkan karena latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda dari masyarakat.
2. Untuk kondisi masyarakat yang masih mencoblos dengan alasan yang tidak jelas, terbukti dari belum dikenalnya peserta pemilu dengan baik oleh masyarakat, membuat masyarakat masih beranggapan bahwa pemilu hanya untuk memilih saja, tidak akan ada pengaruhnya untuk masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup tinggi dan secara umum partisipasi politik masyarakat itu tidak tergantung pada praktek politik uang. Namun kecendrungan praktek politik uang terjadi karena ada yang memberi uang dan membutuhkan uang.
4. Pengetahuan masyarakat yang beragam terhadap politik uang, melahirkan sikap yang beragam pula terhadap praktek politik uang tersebut. Ada sikap yang menolak, ada yang menerima dan cenderung membiarkan praktek politik uang karena menganggap ini praktek ini sebagai sebuah transaksi, yaitu kondisi banyak yang meminta akan banyak yang menyediakan. Namun hasil survey menyatakan bahwa masyarakat mau saja menerima uang dari peserta pemilu namun mereka akan tetap menggunakan pilihan mereka sesuai hati nurani pada saat pencoblosan.

5. Politik uang terjadi dalam segala kesempatan dan cara. Faktor yang paling yang bisa mengantisipasi agar praktek politik uang itu menurun adalah pengetahuan masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten dengan memberikan sanksi yang tegas.
6. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta penegakan aturan hukum yang tegas merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam rangka eliminasi politik uang dalam pelaksanaan pemilu.

6.2 Rekomendasi

1. Penyelenggara pemilu harus membangun kerjasama yang baik dengan peserta pemilu untuk terus melakukan pendidikan politik yang akan menciptakan kesadaran tentang partisipasi, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dengan mau terlibat dalam partai politik.
2. Partai politik harus konsisten melakukan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu bisa berubah. Sehingga Pemilu tidak hanya sebuah ritual kehadiran masyarakat ke lokasi saat pemilihan, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang diharapkan apakah ada dalam visi dan misi yang diusung oleh peserta pemilu.
3. Setiap elemen yang terkait dalam proses pengawalan penyelenggaraan pemilu yang baik dalam masyarakat yang demokratis harus menunjukkan kekonsistennannya dalam menegakan aturan hokum yang sudah ada.

